

## **Eksistensi Mental *Bushido* sebagai Basis Pembentukan Karakter Melayani bagi Birokrat Jepang**

**Dianni Risda<sup>1</sup>, Kama Abdul Hakam<sup>2</sup>, Mupid Hidayat<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Pendidikan Umum dan Karakter, Sekolah Pascasarjana,  
Universitas Pendidikan Indonesia  
e-mail: dianni@upi.edu

### **Abstrak**

Penelitian ini berupaya untuk memberikan informasi objektif mengenai eksistensi dari mental *Bushido* yang menjadi basis pembentukan karakter melayani birokrat Jepang. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, analisis data pada riset ini adalah, reduksi, display dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Hasil penelitian adalah: 1) mental *Bushido* merupakan basis dalam pembentukan karakter melayani birokrat Jepang, karena telah dihabituasikan sejak dulu, melalui pendidikan keluarga, mental tersebut memuat nilai, moral dan karakter, yang mengarah pada moralitas dan integritas birokrat Jepang, tentu berkaitan dengan pelayanan publik secara optimal juga sukarela, 2) kapasitas bangsa Jepang dalam mengoptimalkan eksistensi teknologi, informasi dan komunikasi pada praksis birokrasi, membuat birokrasi dan pelayanan publik Jepang menjadi modern, efektif dan efisien, sehingga menjadi model pelayanan publik berkelas dunia, tentu menegaskan majunya peradaban bangsa Jepang. Penting bagi bangsa Jepang untuk menjaga mutu pelayanan publiknya, agar bisa ditiru, diamati dan dimodifikasi oleh bangsa yang lain, karena berkaitan dengan pemenuhan hak-hak dasar warga negara, sebagai upaya nyata mewujudkan kesejahteraan umum.

**Kata kunci:** *Birokrat, Bushido, Jepang, Karakter, Melayani*

### **Abstract**

This study seeks to provide objective information about the existence of the *Bushido* mentality which is the basis for character building to serve Japanese bureaucrats. This research was conducted through a qualitative approach with a literature study method, the data analysis in this research was, reduction, display and verification or drawing conclusions. The results of the study are: 1) the *Bushido* mentality is the basis for character building to serve Japanese bureaucrats, because it has been habituated for a long time, through family education, that mentality contains values, morals and character, which leads to the morality and integrity of Japanese bureaucrats, of course related to public service. optimally as well as voluntary, 2) the capacity of the Japanese nation in optimizing the existence of technology, information and communication in bureaucratic practice, making the Japanese bureaucracy and public services modern, effective and efficient, so that they become a world-class public service model, of course confirming the advancement of Japanese civilization. It is important for the Japanese to maintain the quality of their public services, so that they can be imitated, observed and modified by other nations, because it is related to the fulfillment of the basic rights of citizens, as a real effort to realize the general welfare.

**Keywords:** *Bureaucrat, Bushido, Japanese, Character, Serve*

### **PENDAHULUAN**

Bangsa Jepang memiliki birokrasi yang perlu diamati, ditiru serta dimodifikasi oleh bangsa yang lain, karena sifatnya yang profesional, modern, sukarela dan terpercaya. Substansi tersebut menegaskan karakter birokrat Jepang yang bermental melayani, sekaligus adaptif pada modernisasi, sehingga mengarah pada pelayanan publik yang efektif

dan efisien. Pandangan sosial birokrat Jepang tersebut, tidak lepas dari pengaruh mental *Bushido* yang sejak dulu telah menjadi basis pembentukan nilai, moral dan karakter bangsa Jepang. Sudarsih (2019, hlm. 60) menjelaskan mental *Bushido* telah ditransformasikan sejak dulu oleh masyarakat Jepang, dan dilakukan secara konsisten, karena mental tersebut mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, baik pada kehidupan sosial maupun politik.

Kemampuan bangsa Jepang dalam mewujudkan kolaborasi antara karakter dan mental melayani dengan modernisasi pada dunia birokrasi, sehingga mengarah pada pelayanan publik kelas dunia. Tentu mental *Bushido* menjadi landasan moral bagi birokrat Jepang untuk tidak praktik-praktik korupsi, dan kejahatan yang lainnya. Karena akan merusak nama baik individu bahkan keluarga, maka pada praksis birokrasi, bangsa Jepang memandang penting sikap saling menghormati, toleransi, tanggap, cakap, dan profesional, sebagai langkah nyata mewujudkan pelayanan masyarakat yang prima. Tsuneki (2014, hlm. 52) menegaskan korupsi merupakan dosa, aib dan perilaku yang sangat memalukan bagi masyarakat Jepang, terlebih birokrat, maka budaya birokrasi di Jepang mengutamakan pelayanan optimal, dan menjauhi perilaku korupsi, agar bermanfaat bagi kemajuan perekonomian dan demokrasi Jepang.

Realitas Jepang sebagai bangsa yang maju, tentu bermanfaat positif terhadap praksis pelayanan publiknya, yang mengakomodir optimalisasi teknologi, informasi dan komunikasi. Sehingga bersifat modern, efektif dan efisien, terlebih Jepang adalah bangsa yang disiplin dan tertib, maka begitu mengoptimalkan waktu untuk produktivitas kerja dan beraktivitas. Maka pelayanan publik di Jepang yang bersifat modern, efektif dan efisien, adalah tuntutan publik, yang konsisten dipenuhi oleh birokrat Jepang, karena berkaitan dengan etos kerja yang tinggi sekaligus mental melayani yang telah terbentuk sejak dulu. Alder (1999, hlm. 40) menjelaskan birokrasi Jepang berfokus pada pelayanan prima, untuk kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat, sehingga konsisten beradaptasi dan berinovasi pada modernisasi.

Komitmen tersebut dicerminkan melalui konsistensi bangsa Jepang dalam menerapkan mental *Bushido* yang disertai oleh pemanfaatan teknologi, informasi juga komunikasi pada praksis birokrasi. Sehingga pelayanan publik berkelas dunia bagi bangsa Jepang tidak sebatas isu dan wacana, tetapi menjadi realitas yang perlu dipertahankan. Terlebih Revolusi Industri 4.0, membuat birokrasi Jepang perlu semakin modern dan kapabel dalam memenuhi hak-hak dasar milik warga Jepang, yang bersifat substantif maupun administratif. Suzuki (2010, hlm. 515) menjelaskan dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan humanis, tentu Pemerintah Jepang memberlakukan pendidikan birokrasi dan karakter bagi birokrat Jepang, agar memiliki komitmen dan konsistensi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adil, bersih dan bermutu.

Sehingga penelitian ini berupaya untuk memberikan informasi argumentatif mengenai pentingnya untuk menelaah dan merefleksikan birokrasi Jepang berbasis mental *Bushido* yang telah dihabituasikan sejak dulu. Bahkan untuk menganalisis kemampuan bangsa Jepang dalam mengoptimalkan eksistensi teknologi, informasi dan komunikasi pada dunia birokrasi, guna mewujudkan pelayanan publik berkelas dunia. Maka praksis kolaborasi menjadi kunci bagi bangsa Jepang dalam mewujudkan birokrasi yang bermutu, tanggap, modern, dengan memuat pelayanan publik yang optimal. Terlebih pandangan tersebut telah menjadi perspektif bangsa Jepang untuk bekerja dan beraktivitas sejak dulu, sehingga menjadi karakter dan berdampak nyata bagi kemajuan bangsa Jepang.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Realitas penelitian kualitatif yang bersifat natural, elaboratif dan mendalam, membuat peneliti yakin untuk mengoptimalkan pendekatan tersebut dalam merampungkan riset ini. Referensi penelitian ini terbagi menjadi, *pertama*, referensi primer, yaitu jurnal, karena memiliki nilai keabsahan yang tinggi, *kedua*, referensi sekunder, seperti, buku, dokumen, serta peraturan negara, supaya meminimalisir kesalahan penelitian yang bersifat

konseptual, prosedural, juga praksis. Analisis data pada penelitian ini, mengoptimalkan teknik analisis kualitatif dari Miles dan Huberman (1992, hlm. 16) yang mengungkapkan prosedur analisis data kualitatif, yaitu, reduksi data, display data juga verifikasi atau penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Eksistensi Mental *Bushido* dalam Pembentukan Karakter Melayani bagi Birokrat Jepang?

Pembentukan karakter melayani birokrat Jepang, tidak lepas dari transformasi mental *Bushido* sejak dulu, karena menjadi landasan habituasi nilai, moral dan karakter warga Jepang. Sehingga pembentukan karakter melayani birokrat Jepang, adalah proses yang terintegrasi dari transformasi karakter terpuji warga Jepang, yang mengarah pada *civil society*. Maka habituasi karakter terpuji yang sifatnya berkelanjutan dalam masyarakat Jepang secara langsung juga tidak langsung berdampak positif pada terbentuknya karakter melayani bagi birokrat Jepang. Mulyadi (2014, hlm. 70) menjelaskan bahwa mental *Bushido* secara komitmen serta konsisten dihabituasikan pada generasi penerus bangsa Jepang, sehingga memiliki karakter jujur, bersih, disiplin, terampil, berani, tanggung jawab, tanggap, sukarela, hemat dan pekerja keras.

Maka pembentukan karakter di dalam keluarga begitu penting, karena menjadi praksis pembelajaran dan habituasi pertama bagi generasi muda. Termasuk upaya transformasi mental *Bushido*, yang telah dilakukan sejak zaman samurai, guna membentuk karakter warga Jepang yang pantang menyerah dan kesatria. Pengaruh mental *Bushido* pada dunia birokrasi Jepang, terlihat pada mutu dan kesukarelaan birokrat pada praksis pelayanan publik, karena berupaya untuk mewujudkan kecepatan serta kepuasan pelayanan untuk masyarakat, supaya hak-hak dasarnya yang bersifat substantif dan administratif bisa dipenuhi oleh negara. Yoshioka, dkk (2013, hlm. 360) menjelaskan bahwa orientasi pelayanan publik di Jepang adalah kepuasan masyarakat, serta pemenuhan hak-hak dasar warga negara, sehingga untuk mewujudkan suatu pelayanan publik berkualitas, maka penguatan mutu birokrat Jepang perlu konsisten dilakukan.

Keterampilan birokrat Jepang dalam mengatasi kebutuhan masyarakat dan persoalan birokrasi yang semakin dinamis dan kompleks, adalah bukti kuatnya pengaruh mental *Bushido* dalam pembentukan karakter birokrat Jepang. Karena substansi penting dari mental *Bushido* adalah sikap pantang menyerah dan sukarela untuk mewujudkan kepentingan umum. Sehingga memudahkan tercapainya orientasi birokrasi bangsa Jepang, yaitu mempertahankan pelayanan publik berkelas dunia, selaku bukti majunya bangsa Jepang. Suliyati (2013) menjelaskan bahwa pada modernisasi saat ini, mental *Bushido* masih dihabituasikan pada generasi muda Jepang, khususnya sikap *Gi* (integritas), *Yu* (keberanian), *Jin* (murah hati), *Makoto-Shin* (kejujuran dan ketulusan), *Rei* (hormat), dan *Meiyo* (menjaga nama baik).

Sehingga pendidikan karakter bagi birokrat Jepang, sudah terintegrasi pada pendidikan karakter warga Jepang, sejak masih kecil pada lingkungan keluarga. Maka Pemerintah Jepang hanya memperkuat karakter birokrat yang berfokus pada kesukarelaan dalam pelayanan umum, yang disertai peningkatan melek teknologi, informasi dan komunikasi, supaya modern. Tugas penting dari Pemerintah Jepang adalah memastikan secara seksama mengenai konsistensi mutu pelayanan publik dari birokrat Jepang, melalui supervisi dan realisasi pendidikan karakter bagi birokrat Jepang. Johnson (1985, hlm. 60) memaparkan strategi Jepang dalam merealisasikan pelayanan publik berkualitas, adalah melalui pendidikan birokrat dan memberikan kesempatan bagi setiap birokrat untuk melanjutkan studinya.

Mental *Bushido* merupakan basis dalam pembentukan integritas dan moralitas birokrat Jepang, sebagai modal sosial dalam mewujudkan kesejahteraan umum. Karena melalui basis moralitas, menjadi pelindung bagi birokrat Jepang, agar tidak terjebak pada kejahatan korupsi, kolusi dan nepotisme, agar keuangan negara bisa dioptimalkan secara penuh untuk kemajuan, pemberdayaan dan kesejahteraan bangsa. Integritas menjadi bukti

bagi birokrat Jepang untuk konsisten dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat, terlebih integritas berkaitan dengan komitmen dan kejujuran individu. Sukaimi (2018, hlm. 253) mengungkapkan karakter disiplin, jujur dan sukarela masyarakat Jepang, merupakan modal sosial dalam merealisasikan kehidupan politik dan hukum bangsa Jepang yang demokratis, beradab dan modern.

Siasat Pemerintah Jepang dalam memantik motivasi birokrat Jepang untuk konsisten dalam meningkatkan mutu individu, adalah melalui apresiasi dan *reward*. Apresiasi tersebut bisa berbentuk penghargaan maupun apresiasi lazim dari pihak pimpinan, maka reward bisa melalui kenaikan jabatan, bahkan pemberian beasiswa untuk lanjut studi. Tentu apresiasi dan reward yang begitu menjanjikan tersebut, menjadi motivasi lebih bagi birokrat Jepang untuk konsisten dalam berkontribusi bagi kemajuan negara, dan pemenuhan hak-hak bersifat dasar bagi masyarakat, juga tidak lupa pemberian *punishment* bersifat ringan dan berat bagi birokrat Jepang yang bekerja di bawah kualifikasi minimum, dan bagi yang melanggar peraturan, selaku efek jera, juga bentuk pendewasaan, supaya lebih baik lagi. Dahlstrom, dkk (2011, hlm. 660) menjelaskan penilaian objektif bagi kinerja birokrat Jepang, berdampak positif bagi kompetisi yang sehat di dalam dunia birokrasi Jepang, dengan memuat *reward* dan *punishment*, sebagai bentuk meritokrasi birokrasi.

Pembentukan karakter warga Jepang yang dilakukan sejak kecil, merupakan ciri khas sekaligus menjadi modal sosial dalam mudahnya upaya transformasi nilai, moral dan karakter yang perlu dimiliki oleh birokrat Jepang. Nilai, moral serta karakter tersebut bersumber pada mental *Bushido* selaku pandangan hidup masyarakat Jepang, yang mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Dalam dunia birokrasi dan pelayanan tentu kepentingan itu berfokus pada pemenuhan hak-hak dasar, bersifat substantif dan administratif bagi masyarakat, yang mengarah pada terwujudnya keadilan sosial dan kesejahteraan umum, termasuk karakter yang anti korupsi, karena mental *Bushido* memuat budaya malu, apabila melakukan tindakan yang tercela, merugikan, dan merusak nama baik individu, keluarga bahkan institusi. Fatimah (2017, hlm. 132) menjelaskan majunya peradaban Jepang karena memiliki nilai, karakter serta kebudayaan yang kuat, termasuk pada modernisasi, bangsa Jepang mampu beradaptasi tanpa merusak nilai, karakter dan kebudayaannya.

Mental *Bushido* berdampak positif bagi pembentukan karakter birokrat Jepang, tentu menjadi modal sosial dalam merealisasikan model pelayanan publik berkelas dunia. Terlebih mental *Bushido* menekankan pentingnya bagi birokrat Jepang untuk memiliki moralitas juga integritas, supaya tugas pokok dan fungsi birokrasi bisa dilakukan secara optimal, juga mampu menjauhi praktik korupsi, yang merugikan masyarakat. Peningkatan kualitas birokrasi Jepang didukung oleh semangat meritokrasi, karena penilaian kinerja bersifat objektif, sehingga bisa meminimalisir kejahatan dan pelanggaran dalam penaiakan jabatan maupun dalam pemberian penghargaan. Realitas mental *Bushido* yang konsisten dihabituisasikan pada generasi penerus bangsa Jepang, secara tegas menjadi garansi mengenai berkualitasnya birokrasi dan pelayanan publik di Jepang.

### **Pengoptimalan Eksistensi Teknologi, Informasi dan Komunikasi pada Pelayanan Publik di Jepang yang Bersifat Modern, Efektif dan Efisien?**

Realitas Jepang sebagai maju, tentu berdampak pada pelayanan publiknya yang mampu mengoptimalkan eksistensi teknologi, informasi dan komunikasi, sehingga bisa mewujudkan pelayanan publik yang modern, efektif dan efisien. Terlebih optimalisasi tersebut tidak disertai dengan pandangan untuk meninggalkan identitas dan kepribadian bangsanya. Mental *Bushido* sebagai basis pembentukan karakter melayani bagi birokrat Jepang, secara nyata bisa bertahan pada realitas globalisasi, bahkan mampu berkolaborasi dengan kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi, yang mengakomodir terwujudnya pelayanan publik berkelas dunia. Realitas kawasan Asia yang tengah marak melakukan modernisasi pada birokrasi dan pelayanan publik, akibat Revolusi Industri 4.0, tentu perlu disertai oleh etos kerja birokrat yang tinggi, sehingga bangsa Jepang menjadi salah satu

rujukan dalam meningkatkan etos kerja birokrat bagi negara lain (McQuiston dan Manoharan, 2020, hlm. 212).

Modernisasi membuat bangsa Jepang konsisten untuk beradaptasi dan berinovasi, agar mampu memecahkan persoalan bangsa yang semakin kompleks juga dinamis. Termasuk pada praksis birokrasi dan pelayanan publik, konsisten dalam mengoptimalkan eksistensi teknologi, informasi dan komunikasi, yang berbasis inovasi, agar memudahkan kehidupan masyarakat Jepang. Substansi tersebut ditegaskan oleh eksistensi lembaga NPA atau *National Personnel Authority*, selaku lembaga yang berwenang melakukan harmonisasi kebijakan antar institusi, melakukan pendidikan dan pelatihan, juga rekrutmen pegawai negeri sipil, agar terwujudnya standarisasi kebijakan dan kualifikasi birokrat yang selaras dengan kebutuhan bangsa Jepang. Zulkarnain dan Prasajo (2021, hlm. 2) memaparkan modernisasi dan keadaban menjadi kunci ajegnya sistem pelayanan publik di Jepang, sehingga birokrasi di Jepang menekankan urgensi moralitas, modernisasi dan meritokrasi.

Pelayanan publik merupakan realisasi penting dari tata kelola pemerintahan dan praksis birokrasi, maka pelayanan publik perlu konsisten berinovasi terhadap realitas Revolusi Industri 4.0. Termasuk bagi dinamika birokrasi Jepang, sebagai model pelayanan publik berkelas dunia, tentu perlu memanfaatkan kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi, untuk memenuhi hak-hak dasar warga negara, baik yang bersifat substantif, maupun administratif, secara masif dan inovatif. Terlebih bangsa Jepang telah memiliki modal sosial bersifat kuat dalam praksis birokrasi yang modern, seperti kecerdasan masyarakat, kemandirian teknologi, dan kecakapan dalam memanfaatkan Revolusi Industri 4.0, yang memuat digitalisasi, robotika, big data, serta metaverse. Le (2018, hlm. 20) menjelaskan Jepang begitu adaptif pada Revolusi Industri 4.0, sehingga berdampak pada pelayanan publik, yang bersifat modern, profesional dan inklusif, dalam meningkatkan mutu pelayanan publiknya, Pemerintah Jepang konsisten merealisasikan inovasi berbasis Revolusi Industri 4.0.

Pandangan Pemerintah Jepang yang memuat kompetisi bagi birokrasi secara sehat dan demokratis, membuat birokrat Jepang untuk konsisten dalam memperkuat melek teknologinya. Karena pelayanan publik di Jepang tidak bisa lepas dari pemberdayaan teknologi, informasi dan komunikasi, supaya bersifat efektif dan efisien, sehingga penguasaan teknologi merupakan tuntutan dasar bagi seluruh birokrat Jepang. Mengingat penekanan Pemerintah Jepang, yaitu meritokrasi, tentu menjadi pemantik bagi birokrat Jepang untuk berkompetisi menjadi yang terbaik, agar mampu membanggakan keluarga, terlebih mental *Bushido*, menekankan urgensi birokrat Jepang untuk memiliki budaya malu, apabila tidak bisa memenuhi tugas dan tanggung jawabnya. Sulistyawaty dan Purba (2019, hlm. 446) mengungkapkan bangsa Jepang memiliki budaya malu, maka berupaya untuk tidak melakukan korupsi, bangsa Jepang berpandangan bahwa etos kerja, adaptasi, mempertahankan budaya dan pemenuhan tanggung jawab, adalah kunci dalam mencapai suatu kesuksesan individu dan komunitas.

Pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi pada pelayanan publik, tentu bisa mengarah pada pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan dan modern, tentu selaras dengan identitas bangsa Jepang. Karena mental *Bushido* sebagai basis pembentukan karakter melayani bagi birokrat Jepang, memuat nilai-nilai kejujuran, keterbukaan dan komitmen, tentu praksis pelayanan publik yang modern, begitu relevan dengan karakteristik birokrasi Jepang. Maka tantangan bagi bangsa Jepang adalah, mereka perlu secara konsisten mempertahankan pelayanan publik modern berkelas dunia secara berkelanjutan, melalui pendidikan karakter di keluarga juga pendidikan serta pelatihan birokrasi secara berkelanjutan. Miwa dan Ramseyer (2003, hlm. 568) memaparkan tata kelola pemerintahan dan birokrasi di Jepang menekankan pentingnya modernisasi, keterbukaan, karakter dan profesionalisme, supaya masyarakat turut terlibat dalam pengawasan pemerintahan bahkan praksis pengambilan keputusan.

Pelayanan publik yang modern, efektif dan efisien di Jepang, tidak bisa dipisahkan dari upaya pembentukan sumber daya manusia Jepang yang inovatif dan unggul. Karena menjadi suatu keharusan, karena bangsa Jepang memiliki keterbatasan dalam sumber daya



alam, maka mereka perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya, untuk mengatasi problematik tersebut. Tentu berdampak pada mampunya bangsa Jepang untuk mengoptimalkan teknologi, informasi juga komunikasi pada praksis pelayanan publik yang berkualitas, sehingga berkelas dunia, akibat kapabel dalam menjawab persoalan birokrasi yang rumit, dan mampu beradaptasi pada praksis pelayanan publik yang merepresentasikan Revolusi Industri 4.0, sehingga Jepang konsisten menegaskan dirinya sebagai raksasa teknologi. Kunci Jepang untuk menjadi negara maju adalah melalui teknologi, ekonomi, industri, pendidikan, kebudayaan, pariwisata serta hubungan internasional (Ranga, dkk, 2017, hm, 374).

Pada basisnya bangsa Jepang tidak hanya sekedar memanfaatkan kemajuan teknologi, informasi, juga komunikasi, tetapi juga menjadi pencipta teknologi, untuk kemajuan peradaban umat manusia. Substansi tersebut menegaskan Jepang sebagai bangsa yang inovatif, kreatif, serta cerdas, karena berkontribusi aktif pada upaya dalam memajukan peradaban umat manusia, termasuk pada dunia birokrasi dan pelayanan publik, agar bersifat modern, efektif dan efisien. Karena Pemerintah Jepang memandang bahwa pelayanan publik perlu bersifat modern bahkan inklusif, maka bisa diakses kapan pun juga di mana pun, serta oleh siapa pun, tanpa memandang status sosial, guna merealisasikan keadilan dan kesejahteraan melalui optimalisasi teknologi, informasi dan komunikasi pada praksis birokrasi dan pelayanan publik, agar berkelas dunia. Riyadi (2004) menjelaskan birokrasi Jepang bersifat tanggap, ramping dan modern, sehingga mengarah pada pemerintahan yang sehat dan bermutu, sebagai salah satu acuan internasional tentang birokrasi yang modern dan efektif, terlebih mengakomodir pemberdayaan masyarakat melalui birokrasi juga pelayanan publik.

Pemanfaatan teknologi, informasi juga komunikasi, nyatanya telah sejak dulu konsisten direalisasikan oleh bangsa Jepang pada praksis pelayanan publik, agar bersifat modern, efektif dan efisien. Sehingga merupakan bukti nyata eksisnya pelayanan publik berkelas dunia, tentu perlu ditiru, diamati dan dimodifikasi oleh bangsa lain, supaya mutu pelayanan publinya bisa meningkat. Kolaborasi antara mental *Bushido* sebagai basis pembentukan karakter melayani bangsa Jepang dengan optimalisasi teknologi, informasi juga komunikasi, nyatanya menjadi solusi efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, serta mengatasi persoalan kebangsaan juga birokrasi yang semakin dinamis dan kompleks, tentu mengakibatkan pelayanan publiknya bersifat modern, efektif dan efisien, juga berkelas dunia. Maka tantangan bagi bangsa Jepang adalah harus mempertahankan realitas tersebut, melalui transformasi mental *Bushido*, di dalam keluarga, sebagai praksis pendidikan karakter dan optimalisasi pendidikan juga pelatihan bagi birokrat, bahkan melalui siasat motivasi dan apresiasi berupa reward and punishment, karena yang menarik untuk ditelaah dan direfleksikan adalah pembentukan mental melayani birokrat Jepang, telah dilakukan sejak dalam pendidikan keluarga, dan konsisten beradaptasi terhadap Revolusi Industri 4.0, supaya konsisten mewujudkan pelayanan publik yang inklusif, modern, efektif juga efisien.

## **SIMPULAN**

Mental *Bushido* menjadi basis dalam pembentukan karakter melayani birokrat Jepang, karena telah dihabituasikan pada generasi penerus Jepang sejak dulu, melalui pendidikan pada keluarga. Mental *Bushido* memuat nilai, moral dan karakter positif bagi birokrat Jepang yang berkaitan dengan pelayanan publik secara sadar dan sukarela, karena berfokus pada moralitas dan integritas birokrat, sehingga menjadi model pelayanan publik berkelas dunia. Kemampuan bangsa Jepang untuk mengoptimalkan eksistensi teknologi, informasi serta komunikasi pada praksis birokrasi, mengakibatkan pelayanan publik menjadi modern, efektif dan efisien, realitas tersebut menegaskan majunya peradaban bangsa Jepang. Maka tantangan bagi bangsa Jepang adalah menjaga mutu pelayanan publik berkelas dunia, supaya ditiru, diamati dan dimodifikasi oleh bangsa yang lain, karena pelayanan publik menjadi wahana dalam memenuhi hak-hak dasar warga negara, sehingga

melalui pelayanan publik yang berkualitas akan memudahkan bangsa dalam mewujudkan kesejahteraan umum.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alder, P. S. (1999). Building Better Bureaucracies. *Academy of Management Perspectives*, 13(4), 36-47. doi: <https://doi.org/10.5465/ame.1999.2570553>
- Dahlström, C., Lapuente, V., & Teorell, J. (2011). The Merit of Meritocratization. *Political Research Quarterly*, 65(3), 656–668. doi: <https://doi.org/10.1177%2F1065912911408109>
- Fatonah. (2017). Belajar dari Karakteristik Bangsa Jepang dalam Menghargai Kebudayaan. *Tsaqofah & Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam*, 2(2), 120-132. doi: <http://dx.doi.org/10.29300/ttjksi.v2i2.711>
- Johnson, C. (1985). The Institutional Foundations of Japanese Industrial Policy. *California Management Review*, 27(4), 59–69. doi: <https://doi.org/10.2307%2F41165156>
- Le, T. (2018). Japan and the Revolution in Military Affairs. *Journal of Asian Security and International Affairs*, 5(2), 172–196. doi: <https://doi.org/10.1177%2F2347797018783112>
- McQuiston, J., & Manoharan, A. P. (2020). E-Government and information technology coursework in public administration programs in Asia. *Teaching Public Administration*, 39(2), 210–226. doi: <https://doi.org/10.1177%2F0144739420978249>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Miwa, Y., & Ramseyer, J. M. (2003). Capitalist Politicians, Socialist Bureaucrats? Legends of Government Planning from Japan. *The Antitrust Bulletin*, 48(3), 595–627. doi: <https://doi.org/10.1177%2F0003603X0304800301>
- Mulyadi, B. (2014). Model Pendidikan Karakter dalam Masyarakat Jepang. *IZUMI*, 3(1), 69-80. doi: <https://doi.org/10.14710/izumi.3.1.69-80>
- Ranga, M. Mroczkowski, T. & Arais, T. (2017). University–Industry Cooperation and the Transition to Innovation Ecosystems in Japan. *Industry and Higher Education*, 31(6), 373-387. doi: <https://doi.org/10.1177%2F0950422217738588>
- Riyadi. (2004). Studi Administrasi dalam Rangka Reformasi Birokrasi di Indonesia (Analisis Perbandingan Indonesia-Jepang). *Jurnal Ilmu Administasi*, 1(3). doi: <https://doi.org/10.31113/jia.v1i3.336>
- Sudarsih, S. (2019). Pentingnya Keteladanan Orangtua dalam Keluarga Sebagai Dasar dalam Pembentukan Karakter Masyarakat Jepang (Suatu Tinjauan Etis). *KIRYOKU*, 3(1), 58-63. doi: <https://doi.org/10.14710/kiryoku.v3i1.58-63>
- Sukaimi, S. & Said, M. (2018). Budaya Disiplin Kerja; sebuah Sketsa Kerja Orang-Orang Jepang. *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 8(2), 228-255. doi: <http://dx.doi.org/10.24014/jiik.v8i2.5729>
- Sulistiyawaty, S., & Purba, N. (2019). Strategi Pencegahan Korupsi dengan Budaya Malu (Studi Komparatif Masyarakat Melayu Indonesia dengan Jepang). *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 4(1), 439-447. doi: <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v4i1.264>
- Suliyati, T. (2013). *Bushido* pada Masyarakat Jepang: Masa Lalu dan Masa Kini. *IZUMI*, 1(1). doi: <https://doi.org/10.14710/izumi.1.1>
- Suzuki, M., Ito, M., Ishida, M., Nihei, N., & Maruyama, M. (2010). Individualizing Japan: Searching for its Origin in First Modernity. *The British Journal of Sociology*, 61(3), 513–538. doi: <https://doi.org/10.1111/j.1468-4446.2010.01324.x>
- Tsuneki, A. (2014). Japanese Bureaucracy. *Japanese Economy*, 39(3), 49-68. doi: <https://doi.org/10.2753/JES1097-203X390303>
- Yoshioka, E., Saijo, Y., Kita, T., Satoh, H., Kawaharada, M., & Kishi, R. (2012). Effect of the Interaction between Employment Level and Psychosocial Work Environment on Insomnia in Male Japanese Public Service Workers. *International Journal of Behavioral Medicine*, 20(3), 355–364. doi: <https://doi.org/10.1007/s12529-012-9230-9>

Zulkarnain, Z. P., & Prasajo, E. (2021). Understanding Japan's Civil Service System: Norms, Meritocracy, and Institutional Change. *Policy and Governance Review*, 5(1), 1-17.  
doi: <https://doi.org/10.30589/pgr.v5i1.355>